

# Diskusi FGB Tentang Reklamasi

Yasraf A. Piliang

Diskusi tentang reklamasi di FGB bertujuan untuk membangun pandangan akademis bersifat objektif-non partisan tentang berbagai persoalan bangsa, khususnya masalah reklamasi.

Diskusi ini tidak bersifat reaktif-instan merespons persoalan Reklamasi Teluk Jakarta, yang ramai di media akhir-akhir ini, akan tetapi konstruktif-berkelanjutan menghasilkan pemikiran, pandangan atau kebijakan tentang persoalan reklamasi secara nasional.

Adanya Moratorium dari Pemerintah untuk menghentikan sementara pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh, penyesuaian aturan hukum, audit lingkungan, untuk membuat acuan umum yang menjadi standar bagi setiap reklamasi di seluruh Indonesia. Evaluasi ini menyangkut analisis dampak lingkungan dan penegakan hukum

SK SA Nomor 12/SK/II-SA/OT/2014 Tentang Etika dan Netralitas Politik Institut teknologi Bandung, yang menyatakan, bahwa ITB menyatakan diri sebagai institusi aktif yang netral dan non-partisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan setiap kelompok, golongan atau kekuatan politik yang ada di masyarakat.

Seringnya ada permintaan dari masyarakat agar ITB menyampaikan suaranya dan berperan aktif dalam berbagai persoalan bangsa termasuk Reklamasi.

Output: pandangan komprehensif ITB sebagai lembaga (bukan individu-individu) terkait masalah Reklamasi, berupa Buku Putih atau Buku.

Masalah reklamasi adalah masalah nasional, seperti yang terjadi di Teluk Jakarta, Pulau Bali, Batam dan beberapa daerah lainnya. Persoalan reklamasi adalah persoalan kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidisiplin. Reklamasi melibatkan persoalan kelautan, tata ruang, pengelolaan air, hukum, politik, ekonomi, kemasyarakatan, sosial dan budaya. Persoalan sosial-budaya meliputi mata pencaharian, kebiasaan, struktur sosial, pandangan hidup, cara hidup, pengetahuan lokal, local genius, dan nilai-nilai.

Diskusi ini diharapkan tidak hanya sekali ini, tapi berkelanjutan, untuk dapat merumuskan sumbangan pemikiran ITB terhadap persoalan reklamasi nasional. Akan tetapi, untuk kesempatan sekarang, diskusi dimulai oleh 3 pembicara, yang melihat reklamasi dari tiga bidang berbeda tapi saling berkaitan.

## **Pembiacara**

1. Prof. Arwin Sabar (Pakar Pengolahan Sumberdaya Air dan Konservasi, TL, Amdal)
2. Dr. Andoyo Wuryanto (Kelautan)
3. Dr. Petrus Natalivan (PWK-RTRW)

## **Prof. Arwin Sabar**

1. Masalah utama banjir sebagai masalah mendasar kota, seperti DKI
2. Kronologi Reklamasi dalam kaitannya dengan Amdal, khususnya terkait dengan masalah banjir
2. Hubungan tak terpisahkan (akan tetapi banyak dilupakan) antara Reklamasi dengan lingkungan di darat (khusus terkait manajemen air). Masalah reklamasi selama ini tidak dikaitkan dg darat, khususnya masalah banjir. Reklamasi memperparah banjir, ketimbang mengurangi.
2. Kronologi wacana hukum terkait (Kepres No. 52, tahun 1995)

## **P. Andojo.**

Prinsip akademi dipegang, pembahasan dari kacamata akademia dan tdak terpengaruh oleh dinamika sosial politik Reklamasi DKI.

1. Praktik reklamasi di indonesia. Reklamasi merupakan salah satu solusi atas permasalahan kekuarangan lahan, sudah dilakukan di beberapa kawasan padat di Indonesia. Berhasil atau tidaknya bergantung kualitas pengelolaan dan pengawasan karena masalah Reklamasi tidak berhenti di pembangunannya.
2. Data-data seputar Reklamasi DKI mulai dari Perda sampai praktek yang sedang berjalan.
3. Garis besar dampak akibat Reklamasi terhadap lingkungan fisik kelautan (sesuai keahlian saya)
4. Peran Teknik Kelautan terhadap perbaikan atas kondisi carut marut Reklamasi DKI, sebatas aspek lingkungan fisik kelautan, sesuai keahlian saya.

## **P. Petrus**

1. Bagaimana proses rencana tata ruang memperoleh dasar hukum
2. Kronologis reklamasi
3. Perspektif dari tata ruang
4. Perspektif dari pelaksanaan pembangunan
5. Perspektif aktor yg terlibat